



RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Tentunya hal tersebut dibutuhkan perencanaan kerja yang baik agar sasaran dan tujuan dapat berjalan dengan baik serta mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Mojokerto, Agustus 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19671020 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 19

2.3. Isu – Isu Penting..... 21

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD 21

2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM
dan SDGs (Sustainable Development Goals) 21

2.3.3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan 23

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN, SASARAN.....25

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25

3.2. Sasaran 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH /OPD
.....31

BAB V PENUTUP.....35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan akhir RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan akhir renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing

OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan;

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 – 2013/2014 Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Seri C Tahun

- 2001) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15) ;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 7);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 38. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi para penyelenggara di

lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

B. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya (2020) serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2023.
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke dalam suatu strategi program/kegiatan.
3. Menyusun kebijakan serta menegaskan tujuan, sasaran program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2022 yang merupakan implementasi dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2024.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

Bab V P E N U T U P

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020, secara umum selaras dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 sedangkan capaian kinerja sasaran pelaksanaan program kegiatan tahun 2020 secara umum dapat disajikan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- f. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
- g. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- h. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 pada umumnya tercapai, Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2020 sampai dengan triwulan keempat diuraikan sebagai berikut :

1.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan.

Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik adalah Jumlah rekening/tagihan telepon, listrik dan air yang terbayar terealisasi 82,28% ;
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional adalah jumlah pajak-pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar 70,11% ;
- c) Penyediaan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan 99,43% ;

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan jumlah barang cetak dan penggandaan 97,61% ;

e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah jumlah kebutuhan sarana dan prasarana peralatan kantor 98,64% ;

f) Penyediaan Makanan dan Minuman

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat 100% ;

g) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah adalah jumlah pelaksanaan perjalanan dinas 98,64% ;

h) Penyediaan Tenaga Kerja

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang di butuhkan 94,81% ;

i) Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) adalah Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas 34,47%.

2.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dan Pengadaan ADM dan Mobil Pelayanan Keliling.

Kegiatan :

a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor adalah 98,43%;

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas 99,98% ;

- c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas 90,77% ;
- d) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor 99,08%;
- e) Pengadaan ADM dan Mobil Pelayanan Keliling
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor 97,39%.

3.) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah terlaksananya laporan kinerja dan keuangan

Kegiatan:

- a) Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan kinerja 98,13% ;
- b) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pencapaian kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan tingkat Kepuasan Masyarakat 100%.

4.) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Kegiatan :

- a) Operasional Penunjang Pelaksanaan Penerapan KTP elektronik
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah penerbitan KTP-el 81.42% ;
- b) Gratis Pengurusan KTP dan KK
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penerbitan KTP dan KK 100% ;
- c) Pelayanan KTP dan KK Keliling
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penerbitan KTP dan KK melalui Pelayanan Keliling 96.33% ;
- d) Operasional Penunjang Pelaksanaan Penerapan KIA
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penerbitan Dokumen KIA 99,23% ;
- e) Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah penerbitan Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 94,38% ;

- f) Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik)

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan 93,05%

5.) Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja Program Pelayanan Pencatatan Sipil adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan. ;

- a) Gratis Pengurusan Akta Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui Pelayanan Keliling 99,07%;

- b) Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Keliling

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian 98,24%;

6.) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah terpeliharanya Perangkat SIAK Online;

- a) Pembangunan dan Operasional SIAK secara terpadu

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan dan Pengoprasian Jaringan SIAK secara Terpadu 96,58% ;

- b) Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Pelaksanaan sosialisasi 99,81% ;

7.) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pencapaian kinerja Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan adalah Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;

- a) Inovasi pelayanan administrasi kependudukan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Inovasi 97,47% ;

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pelayanan melalui inovasi pelayanan. Guna mencegah penyebaran virus covid 19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto merubah sistem pelayanan secara online / daring, antara lain :

1. Motor Sakti (Motor Siap Antar Kematian);
2. Pasukan Balaputra Kita (Pelayanan khusus Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan KIA);

3. Sinden Katut Mas Hardi (Sekali Datang KK,KTP-el, Akta Kematian serta Akta Kelahiran Langsung Jadi);
4. Si Jempol (Siap Jemput Bola) ke desa-desa atau sekolah-sekolah;
5. Pos Ketanmu (Pelayanan Online Sistem Kependudukan Tanpa Ketemu); dan
6. Pelaku Para Dewa (Pelayanan Khusus Perangkat Desa Lewat Whatsapp).

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/ d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/ d Tahun berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi dan Kegiatan s/ d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP; Nilai Reformasi Birokrasi; Nilai IKM	80,10; 70; 82;	-	10.280.328.366	-	0,00%	100%	8.484.518.725	100,00%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	90,00%	-	20.000.000	-	0,00%	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 dokumen	-	10.000.000	-	0,00%	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	8 laporan	-	10.000.000	-	0,00%	8 Laporan	25.000.000	8 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	-	5.792.998.725	-	0,00%	13 Laporan	5.169.998.725	13 Laporan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	-	5.780.998.725	-	0,00%	14 Bulan	5.144.998.725	14 Bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen yang Disusun	12 bulan	-	12.000.000	-	0,00%	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90,00%	-	844.833.408	-	0,00%	100%	483.655.767	100,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DAK Non Fisik	90,00%	-	844.833.408	-	0,00%	304 Desa	443.695.767	304 Desa
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90,00%	-	1.755.651.865	-	0,00%	100%	1.794.819.865	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	1 paket	-	912.652.500	-	0,00%	1 Paket	913.652.500	1 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	-	13.332.000	-	0,00%	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	-	65.000.000	-	0,00%	1 Paket	50.000.000	1 Paket
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Alat Tulis Kantor sesuai Kebutuhan	1 paket	-	67.500.000	-	0,00%	1 Paket	100.000.000	1 Paket
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	-	-	-	0,00%	0%	-	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan	-	181.368.000	-	0,00%	12 Bulan	195.368.000	12 Bulan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DAK Non Fisik	1 aplikasi	-	515.799.365	-	0,00%	1 Aplikasi	515.799.365	1 Aplikasi

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00%	-	800.000.000	-	0,00%	0%	-	0,00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Operasional	3 unit	-	800.000.000	-	0,00%	0%	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,00%	-	660.044.368	-	0,00%	100%	651.044.368	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening / Tagihan Telepon Listrik dan Air yang Terbayar	12 bulan	-	119.000.000	-	0,00%	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	3 orang	-	541.044.368	-	0,00%	3 orang	531.044.368	3 orang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80,00%	-	406.800.000	-	0,00%	100%	335.000.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak-Pajak Kendaraan Dinas Bermotor yang Terbayar, Jumlah Pelaksanaan Perbaikan Kendaraan dinas	16 unit, 12 bulan	-	46.800.000	-	0,00%	16 Unit	75.000.000	16 Unit
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	1 kegiatan, 12 bulan	-	300.000.000	-	0,00%	1 Kegiatan	210.000.000	1 Kegiatan
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	-	60.000.000	-	0,00%	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100,00%	-	937.405.653	-	0,00%	KTP-EI = 98% KK= 98% KIA = 31% SKPWN I = 98%	835.800.000	KTP = 98% KK = 98% KIA = 31% SKPWN I = 98%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	1265008 Dokumen	-	855.000.000	-	0,00%	885000 Dokumen	760.800.000	885000 Dokumen
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	234.064 dokumen, 13 orang	-	530.000.000	-	0,00%	70000 Dokumen	230.000.000	70000 Dokumen
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	12 bulan	-	325.000.000	-	0,00%	225000 Pelayanan	250.000.000	225000 Pelayanan
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen KIA	20.000 blanko	-	82.405.653	-	0,00%	95500 Dokumen	75.000.000	95500 Dokumen
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blangko KIA	75.000 blanko	-	82.405.653	-	0,00%	35000 Dokumen	75.000.000	35000 Dokumen

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100,00%	-	520.890.240	-	0,00%	Akta Lahir (0-18) = 93% Akta Kematian= 98% Akta Perkawinan = 98% Akta Perceraian = 98%	389.600.000	Akta Lahir (0-18) = 93% Akta Kematian= 98% Akta Perkawinan = 98% Akta Perceraian = 98%
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil	699.792 dokumen	-	520.890.240	-	0,00%	310000 Dokumen	389.600.000	310000 Dokumen
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil, Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	18.500 dokumen, 6 orang	-	520.890.240	-	0,00%	19200 Dokumen 6 Orang	389.600.000	19200 Dokumen 6 Orang
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemeliharaan Perangkat SIAK online	100,00%	-	1.014.750.000	-	0,00%	100%	490.000.000	100,00%
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12 kegiatan	-	764.750.000	-	0,00%	12 Kegiatan	250.000.000	12 Kegiatan
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu	12 kali	-	764.750.000	-	0,00%	12 kali	250.000.000	12 kali
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	1 kali	-	250.000.000	-	0,00%	1 kali	120.000.000	1 kali
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	304 desa	-	-	-	0,00%	304 Desa	-	304 Desa
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Penataan dan Pemilahan Arsip Dokumen Administrasi Kependudukan	12 kegiatan	-	250.000.000	-	0,00%	12 Kegiatan	120.000.000	12 Kegiatan
Total					12.753.374.259	4	0,00%	100%	10.012.998.725	0,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Secara garis besar dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk tahun 2021 seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Sasaran	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	√	

1. SASARAN 1: Meningkatkan Kepemilikan Dokumen pendaftaran dan pencatatan sipil

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/ kegagalan dan pencapaian sasaran adalah:

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
Persentase Kepemilikan KTP-el	98%	99,58%	101,61%
Persentase Kepemilikan KK	100%	100%	100%
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	50%	39,84%	79,67%
Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%
Hasil Capaian Kinerja			95,32%

Hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan indikator kinerja angka kepemilikan dokumen kependudukan yang meliputi kepemilikan KTP-el, Kepemilikan KK, Kepemilikan Akta kelahiran dan kepemilikan Akta Kematian menunjukan capaian kinerja sebesar 95,32%. Dari indikator *output* diatas, hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Capaian Kinerja di tinjau dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meliputi:

No	Indikator	Capaian Kinerja
1	Cakupan penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	$\frac{882.352}{886.062} \times 100\% = 99,58\%$
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{466.396}{1.170.748} \times 1000 = 398,37$
3	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{277.110}{305.891} \times 100\% = 90,59\%$
4	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Rentra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan :											
	- KTP	100%		100%	100%	100%	98%	99,84%	101,61%	100%	100%	Kepemilikan Dokumen Kependudukan
	- KK	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapainya Kepemilikan Dokumen
2.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil :											
	- Akta Kelahiran			31.60%	33.60%	40.00%	50%	38,39%	39,84%	37.31%	50%	Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
	- Akta Kematian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapainya Kepemilikan Dokumen
3	persentase kepemilikan akta anak usia 0-18 tahun	95%		85%	85%	100%	100%	90.59%	93.13%	95%	95%	Tercapainya kepemilikan akta kelahiran usia 0-18
4	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Tercapainya Kepuasan Masyarakat Terhadap kepemilikan Dokumen Adminduk

2.3. Isu – Isu Penting

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam prosedur memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan yang sesuai aturan;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya data kependudukan;
3. Kebijakan kependudukan yang berubah – ubah;
4. Perubahan sistem pelayanan kependudukan belum bisa dipahami/dimengerti oleh masyarakat luas;
5. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas;
6. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional pelayanan administrasi kependudukan yang mengakibatkan belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan;
7. Masyarakat kurang memahami akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil;
8. Belum tersosialisasikannya kebijakan kependudukan secara menyeluruh.

2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagai penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Mojokerto akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu “Tertib administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas”.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan menuju pada masyarakat tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta Negara yang

memiliki daya saing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengintruksikan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar melaksanakan pelayanan secara Daring yakni pelayanan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan cara media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui Kios Layanan Mandiri Dukcapil.

Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan difokuskan pada peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan satuan kerja dan komunitas masyarakat. Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan setiap penduduk, peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik, dan pencapaian target kinerja pemerintah daerah di bidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target nasional yang telah ditentukan.

Program sadar pemutakhiran data kependudukan ditandai dengan peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk. Selain itu dengan dilaksanakannya pemutakhiran KK sebagai data induk penduduk secara berkala, dan pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi SIAK.

Sedangkan fokus program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, antara lain dengan pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Serta pemberian kemudahan bagi lembaga pengguna data non lembaga vertikal dalam kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat dilakukan dengan peningkatan perilaku aparatur untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan, menyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan, membuat inovasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan

menjadi efektif dan efisien, serta mengembangkan sistem pelayanan administrasi yang online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.

Dengan adanya web yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat diharapkan akan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak perlu lagi datang berbondong-bondong ke disdukcapil hanya untuk mendapatkan dokumen kependudukan dimaksud. Masyarakat bisa mengakses dimanapaun dan kapan pun mereka memerlukan dokumen kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

2.3.3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan isu-isu nasional dan regional.

Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana prasarana seperti yang dianjurkan oleh pemerintah pusat yakni pengadaan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) sehingga masyarakat tidak harus berbondong-bondong datang ke Disdukcapil hanya sekesar ingin mencetak dokumen kependudukan;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan IT untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan secara online;
3. Peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas dari aparat pelaksana;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemilikan dokumen kependudukan berupa akta-akta pencatatan sipil, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak maupun Kartu Keluarga;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap terjadinya peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;

6. Peningkatan pelayanan prima akan terwujud dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan berkualitas serta didukung tenaga pelaksana (tenaga IT) yang memadai;
7. Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis teknologi; sesuai dengan Misi ke-3 dan sasaran ke-1 pada RPJMD Tahun 2021-2026, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil dengan Teknologi Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada TA. 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C 3.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Mojokerto
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	8,484,518,725	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	8,484,518,725	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen	50,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen	50,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPD yang tersusun	4 Dokumen	25,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPD yang tersusun	4 Dokumen	25,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan yang tersusun	8 Laporan	25,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan yang tersusun	8 Laporan	25,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan	13 Laporan	5,169,998,725	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan	13 Laporan	5,169,998,725	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	5,144,998,725	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	5,144,998,725	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	25,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	25,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	483,655,767	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	483,655,767	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pakaian dinas yang di adakan	60 stel	39,960,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pakaian dinas yang di adakan	60 stel	39,960,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi	304 Desa	443,695,767	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi	304 Desa	443,695,767	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	1,794,819,865	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	1,794,819,865	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	1 Paket	913,652,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	1 Paket	913,652,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	20,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	20,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan / Material	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan	1 Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan / Material	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan	1 Paket	100,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	195,368,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	195,368,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Aplikasi yang di jalankan	1 Aplikasi	515,799,365	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Aplikasi yang di jalankan	1 Aplikasi	515,799,365	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	651,044,368	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	651,044,368	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah rekening / tagihan telepon listrik dan air yang terbayar	12 Bulan	120,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah rekening / tagihan telepon listrik dan air yang terbayar	12 Bulan	120,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	3 orang	531,044,368	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	3 orang	531,044,368	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%	335,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%	335,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pajak-pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar,	16 Unit	75,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pajak-pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar,	16 Unit	75,000,000	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas	12 Bulan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas	12 Bulan		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1 Kegiatan	210,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1 Kegiatan	210,000,000	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 Bulan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 Bulan		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor	12 Bulan	50,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor	12 Bulan	50,000,000	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen KTP-El	98%	835,800,000	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen KTP-El	98%	835,800,000	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen Kartu Keluarga	98%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen Kartu Keluarga	98%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen KIA	31%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen KIA	31%		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen SKPWNI	98%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen SKPWNI	98%		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen KTP-El	885000 Dokumen	760,800,000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen KTP-El	885000 Dokumen	760,800,000	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen Kartu Keluarga	392000 Dokumen			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen Kartu Keluarga	392000 Dokumen		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen SKPWNI	355000 Dokumen			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen SKPWNI	355000 Dokumen		
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan publik pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilembaga/instansi terkait			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan publik pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilembaga/instansi terkait			
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Kartu Keluarga dalam 1 tahun	70000 Dokumen	230,000,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Kartu Keluarga dalam 1 tahun	70000 Dokumen	230,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen KTP-El dalam 1 tahun	130000 Dokumen			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen KTP-El dalam 1 tahun	130000 Dokumen		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen SKPWNI	17000 Dokumen			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen SKPWNI	17000 Dokumen		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	13 Orang	280,800,000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	13 Orang	280,800,000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	225000 Pelayanan	250,000,000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	225000 Pelayanan	250,000,000	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen KIA	95500 Dokumen	75,000,000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen KIA	95500 Dokumen	75,000,000	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan dokumen KIA	35000 Dokumen	75,000,000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan dokumen KIA	35000 Dokumen	75,000,000	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Sarana Prasarana Perekaman KTP		-	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Sarana Prasarana Perekaman KTP		-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pengadaan alat rekam			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pengadaan alat rekam			
3	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	93%	389,600,000	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	93%	389,600,000	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	98%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	98%		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	98%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	98%		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	98%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	98%		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	310000 Dokumen	389,600,000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	310000 Dokumen	389,600,000	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	13500 Dokumen			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	13500 Dokumen		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan	750 Dokumen			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan	750 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	95 Dokumen			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	95 Dokumen		
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran dalam 1 tahun	19200 Dokumen	260,000,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran dalam 1 tahun	19200 Dokumen	260,000,000	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kematian dalam 1 Tahun	3500 Dokumen			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kematian dalam 1 Tahun	3500 Dokumen		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dalam 1 Tahun	80 Dokumen			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dalam 1 Tahun	80 Dokumen		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian dalam 1 Tahun	1 Dokumen			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian dalam 1 Tahun	1 Dokumen		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	6 Orang	129,600,000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	6 Orang	129,600,000	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	490,000,000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	490,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12 Kegiatan	250,000,000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12 Kegiatan	250,000,000	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu	12 kali	250,000,000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu	12 kali	250,000,000	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD/Lembaga yang melakukan Perjanjian Kerja Sama			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD/Lembaga yang melakukan Perjanjian Kerja Sama			
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 kali	120,000,000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 kali	120,000,000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD / Lembaga yang memanfaatkan hak akses data administrasi kependudukan		-	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD / Lembaga yang memanfaatkan hak akses data administrasi kependudukan		-	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi	304 Desa	-	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi	304 Desa	-	
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penataan dan Pemilahan Arsip Dokumen Administrasi Kependudukan	12 Kegiatan	120,000,000	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penataan dan Pemilahan Arsip Dokumen Administrasi Kependudukan	12 Kegiatan	120,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	60 Pegawai	120,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	60 Pegawai	120,000,000	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis	2 Kali	120,000,000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis	2 Kali	120,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 3 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan swasta yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2022 :

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
NO	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2022 tidak ada usulan program dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari masyarakat dan swasta.

BAB III

TUJUAN, SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program dan kegiatan nasional dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana diuraikan berikut :

“Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif “

Tabel T-C.3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	B/L	Rencana Tahun 2022 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			100%	9.173.943.205			100%	8.741.430.357
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			12 Dokumen	100.000.000			12 Dokumen	110.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPd yang tersusun			4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 dokumen	55.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang tersusun			8 laporan	50.000.000	APBD		8 laporan	55.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan			13 Laporan	5.805.998.725			13 Laporan	5.169.998.725
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	5.780.998.725	APBD		14 bulan	5.144.998.725
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	25.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi			100%	483.655.767			100%	483.695.767
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi			60 Stel	39.960.000	APBD		60 stel	40.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DAK Non Fisik			304 Desa	443.695.767	DAK		0%	443.695.767
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100%	1.794.819.865			100%	1.894.819.865
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor			1 Paket	100.000.000	APBD		1 paket	120.000.000
		DAK Non Fisik				813.652.500	DAK			813.652.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat			12 Bulan	20.000.000	APBD		12 bulan	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	B/L	Rencana Tahun 2022 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			1 Paket	50.000.000	APBD		1 paket	60.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor sesuai Kebutuhan			1 Paket	100.000.000	APBD		1 paket	150.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah			12 Bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	60.000.000
		DAK Non Fisik				145.368.000	DAK			145.368.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang di jalankan			1 Aplikasi	515.799.365	DAK		1 Aplikasi	515.799.365
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100%	654.468.848			100%	717.916.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening / Tagihan Telepon Listrik dan Air yang Terbayar			12 Bulan	120.000.000	APBD		12 bulan	130.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan			3 Orang	63.424.480	APBD		3 orang	116.871.632
		DAK Non Fisik				471.044.368	DAK			471.044.368
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100%	335.000.000			100%	365.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak - Pajak Kendaraan Dinas Bermotor yang Terbayar Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas			16 Unit 12 Bulan	75.000.000	APBD		16 unit, 12 bulan	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan rehab sedang/berat gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor			1 Kegiatan 12 Bulan	210.000.000	APBD		1 kegiatan, 12 bulan	220.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor			12 Bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	B/L	Rencana Tahun 2022 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu Indkatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen KTP-El			98%	835.800.000			98,25%	873.300.000
		Persentase kepemilikan dokumen Kartu Keluarga			98%				98,25%	
		Persentase kepemilikan dokumen KIA			31%				31,25%	
		Persentase kepemilikan dokumen SKPWNI			98%				98,25%	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KTP-El			885000 Dokumen	760.800.000			885000 Dokumen	780.800.000
		Jumlah kepemilikan dokumen Kartu Keluarga			392000 Dokumen				392000 Dokumen	
		Jumlah kepemilikan dokumen SKPWNI			355000 Dokumen				355000 Dokumen	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Kartu Keluarga dalam 1 tahun			70000 Dokumen	510.800.000	APBD		70000 Dokumen	520.800.000
		Jumlah Penerbitan Dokumen KTP-El dalam 1 tahun			130000 Dokumen				130000 Dokumen	
		Jumlah Penerbitan Dokumen SKPWNI			17000 Dokumen				17000 Dokumen	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan			13 Orang				13 Orang	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk			225000 Pelayanan	250.000.000	APBD		225000 Pelayanan	260.000.000
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen KIA			95500 Dokumen	75.000.000			95500 Dokumen	100.000.000
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Penerbitan dokumen KIA			35000 Dokumen	75.000.000	APBD		35000 Blangko	85.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	B/L	Rencana Tahun 2022 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)			93%	389.600.000			94%	369.600.000
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian			98%				98,25%	
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan			98%				98,25%	
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian			98%				98,25%	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)			310000 Dokumen	389.600.000			331700 Dokumen	369.600.000
		Jumlah Kepemilikan Akta Kematian			13500 Dokumen				14500 Dokumen	
		Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan			750 Dokumen				800 Dokumen	
		Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian			95 Dokumen				100 Dokumen	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran dalam 1 tahun			19200 Dokumen	389.600.000	APBD		19200 Dokumen	369.600.000
		Jumlah Penerbitan Akta Kematian dalam 1 Tahun			3500 Dokumen				3500 Dokumen	
		Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dalam 1 Tahun			80 Dokumen				80 Dokumen	
		Jumlah Penerbitan Akta Perceraian dalam 1 Tahun			1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan			6 Orang				6 Orang	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemeliharaan Perangkat SIAK online			100%	490.000.000			100%	550.000.000
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu			12 Kegiatan	250.000.000			12 Kegiatan	260.000.000
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah pemeliharaan dan pengoprasian jaringan SIAK secara terpadu			12 kali	250.000.000	APBD		12 kali	260.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	B/L	Rencana Tahun 2022 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu Indkatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi			1 kali	120.000.000			1 kali	160.000.000
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi			304 Desa	-	APBD		304 Desa	0
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah penataan dan pemilahan arsip dokumen administrasi kependudukan			12 Kegiatan	120.000.000	APBD		12 Kegiatan	160.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis			60 Pegawai	120.000.000			60 Pegawai	130.000.000
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis			2 Kali	120.000.000	APBD		2 kali	130.000.000
TOTAL						10.889.343.205				10.534.330.357

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH /OPD

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.03.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.03.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu RKPD 2022 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										10.889.343.205	9.124.114.090	
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										9.173.943.205	7.338.714.090	
2	12	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										100.000.000	110.000.000	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPD yang tersusun	4 Dokumen			50.000.000	55.000.000	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah laporan yang tersusun	8 Laporan			50.000.000	55.000.000	
2	12	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5.805.998.725	5.169.998.725	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			5.780.998.725	5.144.998.725	
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan			25.000.000	25.000.000	
2	12	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										483.655.767	40.000.000	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	60 Stel			39.960.000	40.000.000	
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						DAK Non Fisik	304 Desa			443.695.767	443.695.767	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu RKPD 2022 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1.794.819.865	935.799.365	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	1 Paket			913.652.500	120.000.000		
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan			20.000.000	30.000.000		
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket			50.000.000	60.000.000		
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah Alat Tulis Kantor sesuai Kebutuhan	1 Paket			100.000.000	150.000.000		
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan			195.368.000	60.000.000		
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Jumlah Aplikasi yang dijalankan	1 Aplikasi			515.799.365	515.799.365		
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											654.468.848	717.916.000	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah Rekening / Tagihan Telepon Listrik dan Air yang Terbayar	12 Bulan			120.000.000	130.000.000		
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	3 Orang			534.468.848	587.916.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikabr Kinerja						Pagu RKPD 2022 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	12	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										335.000.000	365.000.000	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah Pajak - Pajak Kendaraan Dinas Bermotor yang Terbayar Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas	16 Unit 12 Bulan			75.000.000	85.000.000	
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan rehab sedang/berat gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 Kegiatan 12 Bulan			210.000.000	220.000.000	
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor	12 Bulan			50.000.000	60.000.000	
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										835.800.000	865.800.000	
2	12	2	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk										760.800.000	780.800.000	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		Jumlah Penerbitan Dokumen Kartu Keluarga dalam 1 tahun Jumlah Penerbitan Dokumen KTP-EI dalam 1 tahun Jumlah Penerbitan Dokumen SKPWNl Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	70000 Dokumen 130000 Dokumen 17000 Dokumen 13 Orang			510.800.000	520.800.000	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	225000 Pelayanan			250.000.000	260.000.000	
2	12	2	2,02		Penataan Pendaftaran Penduduk										75.000.000	85.000.000	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		Jumlah Penerbitan dokumen KIA	35000 Dokumen			75.000.000	85.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu RKPD 2022 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	12	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											335.000.000	365.000.000	
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL											389.600.000	369.600.000	
2	12	3	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil											389.600.000	369.600.000	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran dalam 1 tahun Jumlah Penerbitan Akta Kematian dalam 1 Tahun Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dalam 1 Tahun Jumlah Penerbitan Akta Perceraian dalam 1 Tahun Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	19200 Dokumen 3500 Dokumen 80 Dokumen 1 Dokumen 6 Orang			389.600.000	369.600.000		
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											490.000.000	550.000.000	
2	12	4	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan											250.000.000	260.000.000	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Perangkat SIAK online		Jumlah pemeliharaan dan pengoprasian jaringan SIAK secara terpadu	12 kali			250.000.000	260.000.000		
2	12	4	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											120.000.000	160.000.000	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Perangkat SIAK online		Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi	304 Desa			-	-		
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Perangkat SIAK online		Jumlah penataan dan pemilahan arsip dokumen administrasi kependudukan	12 Kegiatan			120.000.000	160.000.000		
2	12	4	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											120.000.000	130.000.000	
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Perangkat SIAK online		Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis	2 Kali			120.000.000	130.000.000		
TOTAL															10.889.343.205,0	9.124.114.090		

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2022 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19671020 198903 1 009